



# BAB 1

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana kerja tahunan. Selain itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Potensi tersebut menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang merupakan acuan dan tolok ukur pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) tahunan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah tahun 2018-2023.



Berdasarkan visi Pemerintah Kota Bima “Mewujudkan Kota Bima Yang BERKUALITAS dan SETARA Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri” terutama di Misi ke 2 “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan”, maka arah kebijakan pembangunan Kota Bima dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan khususnya pada sektor pertanian adalah Peningkatan Potensi Produk Unggulan Daerah pada Sektor Pertanian Guna Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Peternak.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional peranan sektor pertanian cukup strategis dan memiliki kaitan kuat di sektor hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta antara lain karena berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi yang dapat membawa perubahan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dalam pemulihan ekonomi masyarakat, pemenuhan bahan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan pembangunan nasional disektor pertanian difokuskan pada tiga program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Ketiga program utama tersebut diarahkan untuk : (1) Meningkatkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman bahan pangan dan kelembagaan pangan yang bersumber pada budaya lokal; (2) Mengembangkan sistem agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumber daya manusia; serta (3) Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan penguatan modal dan peningkatan pendapatan.



Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis, yaitu keseluruhan kinerja sistem usaha yang saling terkait, saling bergantung dan saling mempengaruhi mulai dari sub sistem hulu, sub sistem usaha tani (*off farm*), sub sistem hilir (*on farm*) dan sub sistem penunjang yang dikembangkan secara simultan, serasi dan seimbang.

Pengembangan sistem agribisnis cukup penting menyangkut beberapa korelasi sebagai berikut :

1. Pondasi dasar sistem agribisnis belum kokoh, sehingga belum berkembang seperti yang diharapkan;
2. Pendapatan petani masih rendah, baik secara nominal maupun secara relatif dibandingkan sektor lain. Produksi riil tenaga kerja di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain;
3. Terjadi kesenjangan produktivitas dan mutu yang cukup besar sehingga daya saing produk pertanian masih berpeluang untuk ditingkatkan;
4. Lemahnya kelembagaan usaha tani dan perkembangan kemitraan yang saling menguntungkan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima tahun 2013 – 2018.
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);.
17. Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rentra Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai salah satu upaya merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis serta perumusan program dan kegiatan



pembangunan dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan sumber-sumber pendanaan yang dimanfaatkan.

Tujuan penyusunan Rencana Stratejik Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dokumen sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan selama lima tahun ke depan (tahun 2018 sampai dengan tahun 2023), dan sebagai bahan informasi bagi instansi terkait lainnya dalam merumuskan program-program pembangunan secara terpadu antara instansi di pusat, propinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Menyediakan suatu tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;
- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistimatika penulisan RENSTRA Dinas Pertanian Kota Bima adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah



- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. P E N U T U P



## **BAB 2** **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

---

### **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

#### 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi (Perwali No. 58 Tahun 2016).

1. a. Dinas Pertanian Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian.
- b. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
  2. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
  3. Pengembangan prasarana pertanian;
  4. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  5. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
  6. Pembinaan produksi dibidang pertanian;
  7. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
  8. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  9. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
  10. Pemberian rekomendasi ijin usaha teknis pertanian;
  11. Pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian;





12. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bima sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
2. a. **Sekretariat** mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
  2. Pengelolaan urusan keuangan;
  3. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
  4. Pengelolaan urusan ASN; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;



- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- A. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dibidang pertanian;



- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang pertanian;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang pertanian;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pertanian;
- g. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. a. **Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;



2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  6. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  7. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  8. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- A. Seksi Perbenihan dan Perlindungan melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.
  - B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:



- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. Menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan



peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- l. Pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Seksi Produksi:

- A. Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.



- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. Pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. Pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

- A. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.



- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. Penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
  - g. Fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;





- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. a. **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan mempunyai fungsi:
- 1. Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - 2. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  - 3. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  - 4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  - 5. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
  - 6. Pengawasan obat hewan;
  - 7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
  - 8. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;



9. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  10. Pemberian rekomendasi izin di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  11. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  12. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
  13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi:
- A. Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan.
  - B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai fungsi:
    - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
    - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
    - c. Penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
    - d. Penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);



- e. Penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. Penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- g. Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. Pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, Pakan, dan Produksi di Bidang Peternakan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kesehatan Hewan:

- A. Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
  - c. Penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;



- d. Penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. Fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. Penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. Penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izin usaha distributor obat hewan;
- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. *Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.*

- A. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:



- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c. Penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. Pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. Penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. Analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. Penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. Penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. Penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan



- pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - m. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - n. Fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - q. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. a. **Bidang Perkebunan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
- 1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - 2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;



3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
6. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
7. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
8. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang perkebunan;
9. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

- A. Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan perlindungan perkebunan.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan;



- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- c. Penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
- d. Pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
- e. Sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. Penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. Penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. Pengelolaan data OPT;
- m. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;





- q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Seksi Produksi Perkebunan:

- A. Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
  - d. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
  - e. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
  - f. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

- A. Seksi Pengolahan dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - d. Penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - e. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
  - f. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
  - g. Fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
  - h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;



- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
6. a. **Bidang Penyuluhan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
1. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
  2. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
  3. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  4. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
  5. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  6. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
  7. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;

- A. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - c. Penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - d. Penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
  - e. Penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - f. Penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
  - g. Penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
  - h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan



- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;

- A. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - c. Penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - d. Penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
  - e. Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
  - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
  - g. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.



- A. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.
  - B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
    - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode, dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
    - b. Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
    - c. Penyusunan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian;
    - d. Penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
    - e. Penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
    - f. Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
    - g. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
    - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. a **Bidang Prasarana dan Sarana**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan



- pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
  - b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
  - c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
  - e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
  - f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Lahan dan Irigasi:
- A. Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
  - B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai fungsi:
    - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;



- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. Penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;

- A. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;





- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. Penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. Pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. Penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

- A. Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
  - c. Pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;



- d. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. Penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya.

#### 8. **Unit Pelaksana Teknis (UPT).**

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

#### 9. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

- 1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3). Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- 4). Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5). Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

#### 2.1.2. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bima (berdasarkan Perwali Kota Bima Nomor 58 tahun 2016) terdiri dari :



- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
    - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
    - b. Seksi Produksi; dan
    - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  2. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
    - a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
    - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
    - c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
  3. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
    - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
    - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
    - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
  4. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
    - a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
    - b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
    - c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
  5. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
    - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
    - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
    - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

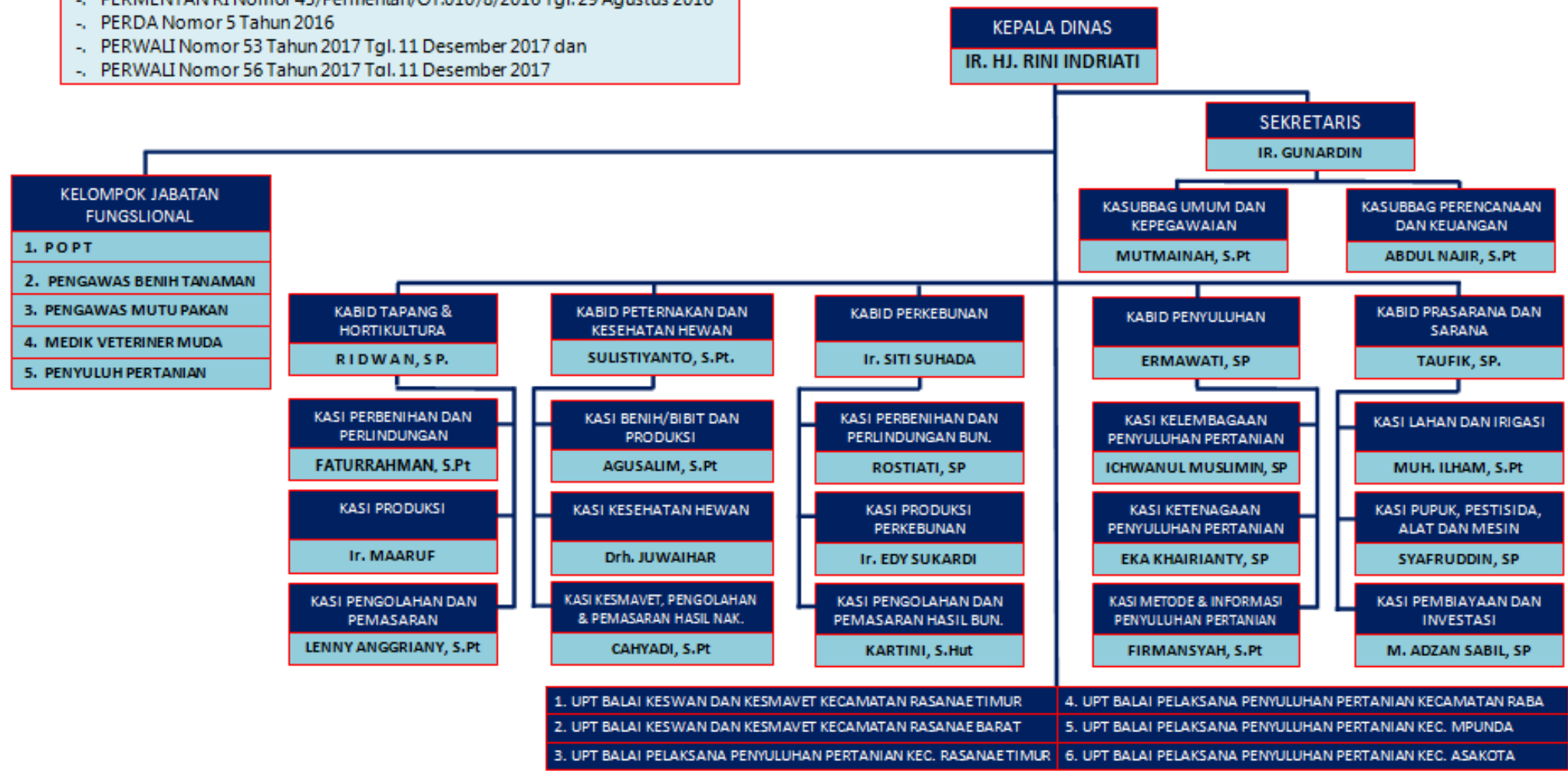


Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan  
Peternakan Kota Bima dapat dilihat pada gambar sebagai  
berikut :



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA BIMA

- PERMENTAN RI Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tgl. 29 Agustus 2016
- PERDA Nomor 5 Tahun 2016
- PERWALI Nomor 53 Tahun 2017 Tgl. 11 Desember 2017 dan
- PERWALI Nomor 56 Tahun 2017 Tal. 11 Desember 2017





## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur;

Sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun 2018.

No	URAIAN	Jumlah Pegawai Berdasarkan										Ket
		Jenis Kelamin			Pendidikan							
		L	P	JM	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	
1	PNS	43	55	98	2	68	5	12	11	-	-	
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Honor K2	7	4	11	-	1	-	1	8	1	-	
4	THL	6	8	14	-	3	-	1	10	-	-	
	THL DRH/D3	1	1	2	-	1		1	-	-		
5	SMD	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
6	Tenaga Kontrak	7	3	10	-	3	-	-	2	2	3	
Jumlah		64	72	136	2	77	5	15	31	3	3	

Tabel 2. Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Pangkat.

No.	Pangkat/golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Utama , IV/c	1	
2.	Pembina Tk. I, IV/b	1	
3.	Pembina, IV/a	4	
4.	Penata Tk. I, III/d	45	
5.	Penata, III/c	18	
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	12	
7.	Penata Muda, III/a	10	
8.	Pengatur Tk. I, II/d	-	
9.	Pengatur, II/c	2	
10.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	-	
11.	Pengatur Muda, II/a	5	
12.	Honerer	11	
13.	THL + SMD	27	
Jumlah		136	



Tabel 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah	Keterangan
1.	Esselon II/b	1	
2.	Esselon III/a	1	
3.	Esselon III/b	5	
4.	Esselon IV	29	
5.	Fungsional	36	
6.	Staf	26	
7.	THL PPL/DRH./SMD	17	
8.	Staf Non PNS	21	
	Jumlah	136	

#### 2.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana.

##### **Sarana**

- Kendaraan dinas : Roda 4 : 4 unit  
Roda 3 : 1 unit  
Roda 2 : 66 unit
- Perlengkapan kantor : Meubelair dan Peralatan Elektronik

##### **Prasarana**

- Kantor dinas : 1 unit
- Kantor Puskesmas : 3 unit
- Kantor Unit Pelayanan IB : 1 unit
- Kantor BPP : 4 unit
- Gedung Rumah Potong Hewan : 1 unit
- Kios daging : 1 unit
- Kebun bibit : 1,2 Ha

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan sasaran/target renstra periode 2014-2018 dan indikator pelayanan dapat dilihat pada tabel 4, sedangkan anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 5.



Pada Tabel 4. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima, dapat dilihat bahwa Produksi Pertanian Tanaman Pangan secara totalitas realisasi produksi terus mengalami peningkatan, namun ada kecenderungan pada komoditi lain selain jagung mengalami penurunan yang diakibatkan oleh tingginya animo masyarakat dalam membudidayakan komoditas tersebut, yang dikarenakan oleh prospek pasar yang sangat baik ketimbang komoditi lainnya. Sementara untuk komoditi perkebunan realisasi produksinya relatif stabil, hanya saja untuk tanaman tembakau mengalami penurunan yang diakibatkan oleh musim yang tidak mendukung. Untuk komoditi peternakan, secara totalitas realisasi produksinya juga relatif stabil, hanya saja untuk realisasi produksi daging sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pemasukan daging dari luar Kota Bima.

Pada Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian Kota Bima, secara keseluruhan selama periode tahun 2014-2015 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, karena berada pada posisi diatas 95% dengan rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 98%.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Kebijakan pembangunan pertanian di Kota Bima masih mengalami berbagai tantangan/permasalahan antara lain :

1. Kemampuan dan akses permodalan petani masih lemah, sehingga tidak mampu mengelola usaha taninya yang menghasilkan produk yang berdaya saing dan berorientasi pasar;
2. Pada umumnya petani belum mampu meningkatkan nilai tawar produk pertanian, juga belum mampu menyuarakan kepentingan mereka baik secara ekonomi maupun secara politik;





3. Pengetahuan, keterampilan dan sikap petani untuk penerapan teknologi anjuran masih perlu untuk terus ditingkatkan;
4. Harga komoditi pertanian yang relatif tidak stabil atau fluktuasi harga yang masih tinggi terutama pada saat panen raya;
5. Penggunaan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan belum sesuai anjuran;
6. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana lahan dan air yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian;
7. Terbatasnya sumber daya air sebagai air irigasi pertanian;
8. Pengelolaan lahan kering dan miring belum menerapkan sistem konservasi lahan;
9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan konservasi sumber daya alam (SDA) masih rendah;
10. Kesadaran dalam melaksanakan aktifitas pertanian secara berkelompok yang masih kurang;
11. Liberalisasi perdagangan/perdagangan bebas.
12. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi, kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar
13. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting sistem pemeliharaan ternak secara intensif

#### 2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
2. Adanya program diklat bagi petugas;
3. Adanya koordinasi yang baik;
4. Adanya kewenangan perencanaan dari bawah (bottom up);
5. Adanya kinerja yang baik dari petugas lapangan;



6. Adanya kelembagaan petani/peternak (kelompok tani/ternak);
7. Tersedianya tenaga kerja terampil dan mekanisasi pertanian;
8. Adanya potensi sumber daya alam yang memungkinkan pengembangan agribisnis;
9. Adanya pasar yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani/peternak;
10. Tersedianya sarana produksi yang mendorong penerapan paket teknologi anjuran;
11. Minat masyarakat untuk berusaha tani cukup tinggi.
12. Luas lahan sawah 2.422 Ha merupakan irigasi dengan IP 1-3 untuk pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.
13. Pangsa pasar besar. Hal ini ditunjang oleh posisi Kota Bima sebagai kota transit yang berada pada segi tiga emas pariwisata (Bali–Komodo–Tanah Toraja);
14. Jalur transportasi lancar, ditunjang oleh adanya sarana terminal dan pelabuhan laut.
15. Jalur telekomunikasi lancar, baik melalui telepon rumah maupun telepon seluler;
16. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan membawa konsekwensi terhadap meningkatnya jumlah permintaan akan produk-produk pertanian, baik produk mentah maupun olahan untuk pasar domestik, regional, nasional maupun ekspor.



# **BAB 3** PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

---

## **ISU NASIONAL**

### **1. Pembangunan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

Lingkungan strategis tingkat internasional yang paling dominan dalam mendorong perubahan struktur perekonomian dan tatanan masyarakat Kota Bima dimasa mendatang sehingga mempengaruhi arah dan sasaran pembangunan pertanian adalah : (a) liberalisasi pasar global dan ketidakadilan perdagangan internasional; (b) perubahan system dan manajemen produksi; (c) perhatian pada perwujudan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan; dan (d) kemajuan pesat dalam penemuan dan pemanfaatan teknologi tinggi.

Dilain pihak, lingkungan strategis tingkat nasional dan lokal yang dominan mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan tatanan masyarakat Kota Bima serta diperkirakan sangat berpengaruh terhadap arah dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dimasa mendatang adalah : (a) penduduk dan pola permintaan pangan dan bahan baku; (b) terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke pemukiman; (c) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (d) terbatasnya prasarana, sarana, lahan dan air, (e) terbatasnya akses petani terhadap permodalan, serta (f) belum optimalnya sistem perbenihan nasional.

Berbagai faktor tersebut perlu dicermati dalam menyusun kebijakan dan rencana strategis pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan kedepan.

### **2. Pembangunan Sub Sektor Perkebunan**



Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan sektor pertanian, tujuan pembangunan sub sektor perkebunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;
4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;
5. Memenuhi kebutuhan produk perkebunan dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;
6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;
7. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan;
9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;
10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Sedangkan sasaran pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDB, Perkebunan 11,41 % (berdasarkan harga berlaku) dan harga konstan 3,14%
2. Keterlibatan tenaga kerja petani perkebunan 20,9 juta orang.
3. Peningkatan Pendapatan Perkebunan menjadi US\$1.780/KK/Thn/2 ha
4. Nilai Tukar Petani (NTP) 108,20
5. Penerimaan ekspor US \$ 51,99 milyar
6. Kebutuhan inventasi perkebunan 62,9 triliun bersumber dari APBN 1,773 triliun (2,82%) dan sumber lain seperti APBD, perbankan dan swadaya masyarakat senilai 61,127 triliun (97,18%)



### **3. Pembangunan Sub Sektor Peternakan**

Pembangunan sub sektor peternakan dihadapkan pada berbagai tantangan dari lingkungan dalam negeri maupun lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan permintaan produk peternakan, penyedia bibit ternak, kualitas bibit, berbagai wabah penyakit ternak, serta tuntutan perubahan manajemen sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat. Sedangkan lingkungan global berkaitan dengan liberalisasi perdagangan global dan ketidakadilan perdagangan internasional, perubahan sistem dan manajemen produksi, konsumsi global, tuntutan terhadap perwujudan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (*Millenium, Development Goal*) serta adanya kemajuan pesat dalam penemuan dan pemanfaatan teknologi.

Ditengarai kecenderungan peningkatan import daging, sapi bakalan maupun sapi potong tidak hanya semata-mata karena kesenjangan permintaan dan penawaran, tapi disebabkan juga adanya kemudahan dalam pengadaan produk impor (volume, kredit, transportasi) serta harga produk yang lebih murah. Kondisi tersebut menyebabkan peternak lokal tidak mampu bersaing dan kurang bergairah karena harga daging relatif murah.

Usaha dan industri peternakan dalam negeri tidak mampu memproduksi karena ketidakmampuan dalam membiayai produksi dan biaya-biaya lainnya. Dalam jangka panjang masuknya import daging tersebut akan merusak usaha dan industri peternakan nasional. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan terhadap produk impor semakin besar.

## **ISU REGIONAL**

### **1. Isu-Isu Pembangunan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

NTB memiliki keragaman iklim yang menguntungkan bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian, baik tanaman pangan



maupun hortikultura. Posisi NTB berada pada jalur mata rantai pemasaran yang strategis, yaitu dekat dengan sentra Industri Bali dan Jawa, dan dekat dengan NTT sebagai peluang pengembangan pasar NTB.

Dengan posisi geografisnya yang strategis dan keragaman modal sosial yang dimilikinya, NTB berpeluang besar menjadi daerah maju yang berdaya saing. Hanya saja untuk mencapai itu, percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal dan mendorong masuknya investasi menjadi kebutuhan mutlak.

Percepatan pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pelayanan prima menjadi salah satu ukuran utamanya. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya aparat pemerintah yang mampu memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Selain itu diperlukan pula aparat yang cakap mendorong sinergitas antara birokrasi, dunia usaha dan masyarakat khususnya di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Percepatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura bisa terealisasi jika adanya dukungan infrastruktur wilayah yang memadai. Kondisi infrastruktur strategis NTB masih belum optimal mendukung pembangunan sektor perekonomian daerah khususnya pertanian yang ditunjukkan dengan masih terbatasnya infrastruktur antar wilayah dan antar sektor. Hal tersebut sering menjadi kendala masuknya investasi dibidang pertanian.

Percepatan pembangunan harus selalu berbasis pada konsepsi pembangunan berkelanjutan. NTB yang merupakan provinsi kepulauan sepatutnya memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dengan orientasi pada keberpihakan pada rakyat miskin.

Produktivitas pertanian di Nusa Tenggara Barat saat ini yang meliputi komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan beberapa komoditas lainnya dalam beberapa tahun terakhir mencatat nilai surplus. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB mencatat bahwa, NTB



mampu memproduksi rata-rata 2 juta ton beras setiap tahunnya, sementara untuk kebutuhan masyarakat NTB hanya berkisar antara 600 - 700 ribu ton pertahun.

NTB merupakan daerah penyangga pangan untuk propinsi tetangga seperti Bali dan NTT, dan bila sektor ini digarap lebih serius dari hulu sampai hilir, dari proses penanaman, pasca panen hingga ke industrilisasi atau pengolahan, maka pertanian di NTB bisa menjadi sumber penghasilan atau kekuatan yang mensejahterakan warga masyarakatnya.

## **2. Isu-Isu Pembangunan Sub Sektor Perkebunan.**

Propinsi NTB telah merumuskan program pembangunan perkebunan berdimensi global, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing masyarakat.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional. Secara ekologis berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan salah satu komoditas pertanian yang pertumbuhannya positif terhadap pendapatan devisa negara adalah komoditas perkebunan.

Komoditas perkebunan secara ekonomi mampu bertahan pada saat krisis ekonomi terutama peluangnya dibidang ekspor, sementara itu kebijakan dasar pembangunan perkebunan mengarah kepada upaya menggerakkan dan memfasilitasi pengembangan produksi perkebunan yang berorientasi pasar melalui pemberdayaan dan penguatan hilir guna memperoleh nilai tambah dan daya saing dengan dukungan partisipasi masyarakat, beberapa komoditas unggulan di sub sektor perkebunan di wilayah NTB yang saat ini dibudidayakan antara lain kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa. Komoditas yang dibudidayakan ini, tentunya perlu didukung oleh upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas



komoditas perkebunan, serta meningkatkan nilai tambah dari produk-produk perkebunan tersebut.

Secara garis besar, masalah-masalah pembangunan perkebunan yang dihadapi saat ini mencakup dua kelompok permasalahan. Selain permasalahan struktural yang berkaitan dengan program pelaksanaan pembangunan perkebunan, juga permasalahan fungsional yang terkait dengan aspek pembangunan perkebunan, yang meliputi aspek budidaya dan produktivitas, kemampuan dan pematapan SDM petani dan petugas lapangan, penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kemitraan, oleh karenanya perlu lebih memperhatikan aspek-aspek kewilayahan dan sumber daya secara keseluruhan.

### **3. Isu-Isu Pembangunan Sub Sektor Peternakan**

Propinsi NTB merupakan propinsi yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan peternakan. Berdasarkan data BPS Tahun 2017, populasi sapi potong di Propinsi NTB sebanyak 1.193.249 ekor merupakan 4 provinsi terbesar di Indonesia, populasi kerbau sebanyak 119.265 ekor (3 provinsi terbesar), kambing sebanyak 678.769 ekor (9 provinsi terbesar), kuda sebanyak 49.559 ekor (2 provinsi terbesar) dan ayam buras sebanyak 8.385.236 ekor (10 provinsi terbesar).

Jika subsektor basis yang mempunyai keunggulan komparatif ini dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka akan mampu menjadi pendorong dan menjadi penggerak roda perekonomian di NTB dan akan mampu memenuhi kebutuhan pangan asal ternak (gizi) untuk masyarakatnya sendiri dan nantinya dapat berkembang sebagai daerah penyangga kebutuhan pangan asal ternak nasional.

Untuk mendukung pembangunan peternakan di provinsi NTB, pada tahun 2018 Kementan telah meluncurkan paket-paket program Pro Peternak, antara lain UPSUS SIWAB, Program BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (Bekerja) dan Penambahan Indukan Impor. Untuk mendukung peningkatan populasi sapi di Provinsi NTB, Ditjen PKH Kementan juga akan menambah indukan impor sebanyak 455 ekor.





### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Bima

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	<b>BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendapatan petani masih rendah baik secara nominal maupun secara relatif dibandingkan dengan sektor lain.</li><li>2. Usaha pertanian yang ada didominasi dengan ciri skala kecil; modal terbatas; teknologi sederhana; sangat dipengaruhi musim; wilayah pasarnya lokal; umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga; akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah; pasar komoditi pertanian sifatnya mono/oligopsoni sehingga terjadi eksploitasi harga pada petani.</li><li>3. Kurang memperhatikan aspek keunggulan komparatif yang dimiliki daerah, pembangunan agribisnis yang ada masih belum didasarkan kepada kawasan unggulan.</li><li>4. Kurang mampu bersaing dipasaran, daya saing produk pertanian yang masih rendah termasuk produk olahan.</li></ol>	<b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif.</li><li>2. Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air.</li><li>3. Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal.</li><li>4. Permodalan petani dalam mendukung usaha taninya masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas.</li><li>5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A).</li><li>6. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah.</li><li>7. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan.</li><li>8. Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum Adanya Penerbitan Payung Hukum (PERDA dll) tentang Penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)</li><li>2. Kurang Tersedianya Anggaran Untuk penyediaan sarana produksi pertanian serta Pengembangan Sumber Daya Lahan dan Air</li><li>3. Kurang Tersedianya Anggaran untuk menumbuh kembangkan industri pada sektor pertanian</li><li>4. Kurangnya lembaga penyanggah untuk menstabilkan harga komoditi pertanian seperti LUEP dan LDPM.</li><li>5. Kurangnya kemitraan dengan pengusaha dibidang pertanian dan peternakan dalam upaya peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan.</li><li>6. Sistem Usaha Peternakan Yang Masih Bersifat Tradisional (Ekstensif).</li></ol>



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	5. Belum adanya kegiatan usaha pertanian yang berwawasan agroindustri.	9. Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi tanaman pertanian di tingkat petani.  <b>BIDANG PETERNAKAN</b> 1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah. 2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat. 3. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat. 4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung Propinsi NTB sebagai salah satu pusat penyedia ternak potong nasional. 5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak. 6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak. 7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi). 8. Angka kelahiran ternak masih rendah (44,33% dari induk produktif) dan angka kematian anak sebesar 0,59% dari jumlah pedet. 9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular. 10. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang. 11. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang	7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Aparatur.



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		<p>ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan tehnologi pasca panen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan.</li><li>13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak.</li><li>14. Akses permodalan masih dirasakan sulit.</li><li>15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata.</li><li>16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awearness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging, razia daging legal dan ilegal dan regulasi).</li><li>17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar.</li><li>18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).</li><li>19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).</li><li>20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang.</li><li>21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produksi, hanya menunggu hasil.</li></ol>	



### 3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Tabel 7. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi : <b>Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Disperta	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<b>Misi :</b> Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	<b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b> 1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif. 2. Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air. 3. Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal. 4. Permodalan petani dalam mendukung usaha taninya masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas. 5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A). 6. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah. 7. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan. 8. Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging. 9. Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi	1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian 2. Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman 3. Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun 4. Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim 5. Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik.	1. Adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan beberapa aspek lainnya dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani peternak. 2. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/tanaman 3. Adanya partisipasi penyuluh dalam



		<p>tanaman pertanian di tingkat petani.</p> <p><b>BIDANG PETERNAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah.</li><li>2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.</li><li>3. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.</li><li>4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung Propinsi NTB sebagai salah satu pusat penyedia ternak potong nasional.</li><li>5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.</li><li>6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.</li><li>7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).</li><li>8. Angka kelahiran ternak masih rendah (44,33% dari induk produktif) dan angka kematian anak sebesar 0,59% dari jumlah pedet.</li><li>9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.</li><li>10. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang.</li><li>11. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan teknologi pasca panen.</li><li>12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan.</li><li>13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Keengganan masyarakat untuk memelihara/ melaksanakan teknik budidaya secara intensif</li><li>7. Sumber pendanaan yang masih minim untuk penyediaan sarana produksi pertanian dan menumbuhkembangkan industriliasiasi sektor pertanian</li><li>8. Sumber pendanaan yang masih minim dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan petani</li><li>9. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.</li></ol>	<p>pembinaan kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.</li></ol>
--	--	---	---	---



		<p>pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>14. Akses permodalan masih dirasakan sulit.</li><li>15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata.</li><li>16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging, razia daging legal dan ilegal dan regulasi).</li><li>17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar.</li><li>18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).</li><li>19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).</li><li>20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang.</li><li>21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produksi, hanya menunggu hasil.</li></ol>		
--	--	---	--	--



### 3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Table 8. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar), produksi hortikultura (mangga, bawang merah, kacang panjang, garoso, pisang), produksi peternakan (sapi, kambing, ayam dan itik/bebek) dan produksi perkebunan (jambu mente, tembakau, kelapa);	<b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif.</li> <li>Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air.</li> <li>Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal.</li> <li>Permodalan petani dalam mendukung usaha taninya masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas.</li> <li>Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A).</li> <li>Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah.</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan.</li> <li>Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging.</li> <li>Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi tanaman pertanian di tingkat petani.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian</li> <li>Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman</li> <li>Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun</li> <li>Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim</li> <li>Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik.</li> <li>Keengganan masyarakat untuk memelihara/ melaksanakan teknik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan beberapa aspek lainnya dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani peternak.</li> <li>Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/ tanaman</li> <li>Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok</li> <li>Adanya ketergantungan</li> </ol>
2.	Meningkatnya penggunaan benih dan bibit unggul bermutu pada tiga komoditi utama pertanian yakni padi, jagung dan kedelai, perkebunan serta peternakan;			
3.	Meningkatnya pusat penangkaran benih tanaman pangan, perkebunan dan pembibitan ternak;			



No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
4.	Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam budidaya tanaman;	<p><b>BIDANG PETERNAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah.</li> <li>2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.</li> <li>3. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.</li> <li>4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung Propinsi NTB sebagai salah satu pusat penyedia ternak potong nasional.</li> <li>5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.</li> <li>6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.</li> <li>7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).</li> <li>8. Angka kelahiran ternak masih rendah (44,33% dari induk produktif) dan angka kematian anak sebesar 0,59% dari jumlah pedet.</li> <li>9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.</li> <li>10. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang.</li> <li>11. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan teknologi pasca panen.</li> <li>12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan.</li> <li>13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak</li> </ol>	<p>budidaya secara intensif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Sumber pendanaan yang masih minim untuk penyediaan sarana produksi pertanian dan menumbuhkembangkan industrialisasi sektor pertanian</li> <li>8. Sumber pendanaan yang masih minim dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan petani</li> <li>9. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.</li> </ol>	<p>pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.</p>
5.	Tersedianya pupuk bersubsidi baik organik maupun pupuk anorganik untuk memenuhi kebutuhan tanaman;			
6.	Meningkatnya jumlah dan kualitas pelaku usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;			
7.	Menurunnya tingkat serangan Organisma Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan;			
8.	Meningkatnya produksi daging, telur dan hasil olahan;			
9.	Berkurangnya penyebaran penyakit menular hewan;			
11.	Meningkatnya populasi dan kualitas genetik ternak ( ternak besar, kecil dan unggas );			





No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
12.	Meningkatnya produktivitas lahan kering melalui optimalisasi lahan dan perbaikan sumber daya air;	berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak.		
13.	Terpeliharanya sarana dan prasarana irigasi melalui kegiatan pengolahan lahan dan air (PLA);	14. Akses permodalan masih dirasakan sulit. 15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata.		
14.	Tersedianya produk-produk tanaman pangan, perkebunan dan peternakan unggulan daerah;	16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging, razia daging legal dan ilegal dan regulasi). 17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar.		
15.	Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik air tanah maupun air permukaan untuk tanaman dan peternakan;	18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli). 19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).		
16.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi pedesaan.	20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang. 21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produksi, hanya menunggu hasil.		



### 3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tabel 9. Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Kota Bima sebagai sentra produksi komoditi tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta produk olahan yang berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.	<b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif.</li> <li>Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air.</li> <li>Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal.</li> <li>Permodalan petani dalam mendukung usaha taninya masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas.</li> <li>Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A).</li> <li>Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah.</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan.</li> <li>Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging.</li> <li>Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian</li> <li>Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman</li> <li>Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun</li> <li>Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim</li> <li>Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik.</li> <li>Keengganan masyarakat untuk memelihara/</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan beberapa aspek lainnya dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani peternak.</li> <li>Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/tanaman</li> <li>Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok</li> <li>Adanya ketergantungan</li> </ol>



No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>tanaman pertanian di tingkat petani.</p> <p><b>BIDANG PETERNAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah.</li><li>2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.</li><li>3. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.</li><li>4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung Propinsi NTB sebagai salah satu pusat penyedia ternak potong nasional.</li><li>5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.</li><li>6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.</li><li>7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).</li><li>8. Angka kelahiran ternak masih rendah (44,33% dari induk produktif) dan angka kematian anak sebesar 0,59% dari jumlah pedet.</li><li>9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.</li><li>10. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang.</li><li>11. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan</li></ol>	<p>melaksanakan teknik budidaya secara intensif</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Sumber pendanaan yang masih minim untuk penyediaan sarana produksi pertanian dan menumbuhkembangkan industriliasasi sektor pertanian</li><li>8. Sumber pendanaan yang masih minim dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya dan petani</li><li>9. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.</li></ol>	<p>pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.</p>



No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>prasarana RPH dan tehnologi pasca panen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan.</li><li>13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak.</li><li>14. Akses permodalan masih dirasakan sulit.</li><li>15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata.</li><li>16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging, razia daging legal dan ilegal dan regulasi).</li><li>17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar.</li><li>18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).</li><li>19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).</li><li>20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang.</li><li>21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produksi, hanya menunggu hasil.</li></ol>		



Tabel 10. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan lahan pertanian untuk budidaya komoditas hortikultura.</li> <li>2. Pengembangan pertanian lahan basah untuk peningkatan ketahanan pangan.</li> <li>3. Membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis.</li> <li>4. Penataan Kawasan lindung dan kawasan hutan produksi di Kota Bima</li> </ol>	<p><b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif.</li> <li>2. Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air.</li> <li>3. Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal.</li> <li>4. Permodalan petani dalam mendukung usaha taninya masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas.</li> <li>5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A).</li> <li>6. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah.</li> <li>7. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan.</li> <li>8. Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging.</li> <li>9. Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi tanaman pertanian di tingkat petani.</li> </ol> <p><b>BIDANG PETERNAKAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian</li> <li>2. Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman</li> <li>3. Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun</li> <li>4. Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim</li> <li>5. Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik.</li> <li>6. Keengganan masyarakat untuk memelihara/ melaksanakan teknik budidaya secara intensif</li> <li>7. Sumber pendanaan yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan beberapa aspek lainnya dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani peternak.</li> <li>2. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/ tanaman</li> <li>3. Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok</li> <li>4. Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang</li> </ol>



No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah.</li><li>2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.</li><li>3. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.</li><li>4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung Propinsi NTB sebagai salah satu pusat penyedia ternak potong nasional.</li><li>5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.</li><li>6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.</li><li>7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).</li><li>8. Angka kelahiran ternak masih rendah (44,33% dari induk produktif) dan angka kematian anak sebesar 0,59% dari jumlah pedet.</li><li>9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.</li><li>10. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang.</li><li>11. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan teknologi pasca panen.</li><li>12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan.</li></ol>	<p>masih minim untuk penyediaan sarana produksi pertanian dan menumbuhkembangkan industriliasisasi sektor pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Sumber pendanaan yang masih minim dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya dan petani</li><li>9. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.</li></ol>	<p>diproduksi oleh petani peternak.</p>



No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"><li>13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak.</li><li>14. Akses permodalan masih dirasakan sulit.</li><li>15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata.</li><li>16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging, razia daging legal dan ilegal dan regulasi).</li><li>17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar.</li><li>18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).</li><li>19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).</li><li>20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang.</li><li>21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produksi, hanya menunggu hasil.</li></ol>		



### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

1. Lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
2. Semakin berkurangnya sumber daya air sebagai sumber air irigasi yang berdampak pada menurunnya areal tanam;
3. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumber daya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian;
4. Kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran;
5. Semakin menurunnya produksi dan kualitas tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan obat-obatan/empon-empon);
6. Semakin rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi. Kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar;
7. Kurangnya penerapan industrialisasi pengolahan produk hasil pertanian;
8. Belum adanya kegiatan usaha pertanian yang berwawasan agroindustri.
9. Pemasaran hasil produk yang masih sangat fluktuatif;
10. Sering terjadi kendala dalam pemasaran produk olahan hasil pertanian;
11. Minimnya kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian;
12. Kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak yang perlu terus ditingkatkan.





## **BAB** 4

## **TUJUAN DAN SASARAN**

---

Visi Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah **"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"**, dan dalam menunjang pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan misi *"Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan"*.

Dengan rumusan visi tersebut di atas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023) diharapkan kondisi pembangunan pertanian di Kota Bima mengalami perubahan dan lompatan secara signifikan yang diindikasikan oleh 2 (dua) indikator keberhasilan utama, yaitu :

1. Tercapainya swasembada dan swesembada berkelanjutan yang ditandai dengan makin meningkatnya produktivitas lahan dan kualitas produksi komoditi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
2. Masyarakat yang maju dan mandiri, ditandai dengan adanya kemajuan dalam hal tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan pendapatan petani dan pelaku usaha pertanian serta ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai.

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima adalah menggambarkan rumusan situasi yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Bima selama 5 tahun ke depan, adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima selama 5 tahun ke depan dapat disajikan pada tabel 11 dibawah ini :



Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima

**Misi** : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar), produksi hortikultura (mangga, bawang merah, kacang panjang, garoso, pisang), produksi peternakan (sapi, kambing, ayam dan itik/bebek) dan produksi perkebunan (jambu mente, tembakau, kelapa);	Meningkatnya Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	PDRB Sektor Pertanian -. Kontribusi Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB	11,87%	11,89%	11,91%	11,94%	11,96%
2.	Meningkatnya penggunaan benih dan bibit unggul bermutu pada tiga komoditi utama pertanian yakni padi, jagung dan kedelai, perkebunan serta peternakan;	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	-. Kontribusi Pertanian Tanaman Pangan Terhadap PDRB	47,34%	47,44%	47,53%	47,63%	47,72%
3.	Meningkatnya pusat penangkaran benih tanaman pangan, perkebunan dan pembibitan ternak; Meningkatkan penggunaan pupuk organik dalam budidaya tanaman;	Meningkatnya Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	-. Kontribusi Pertanian Horikultura Terhadap PDRB	11,52%	11,55%	11,57%	11,59%	11,62%
4.	Tersedianya pupuk bersubsidi baik organik maupun pupuk anorganik untuk memenuhi kebutuhan tanaman;		-. Kontribusi Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	1,50%	1,50%	1,50%	1,51%	1,51%
5.	Meningkatnya jumlah dan kualitas pelaku usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;							
6.	Menurunnya tingkat serangan Organisma Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan;		-. Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB	36,51%	36,59%	36,66%	36,76%	36,81%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
7.	Meningkatnya produksi daging, telur dan hasil olahan;		- Kontribusi Jasa Pertanian dan Perburuan Terhadap PDRB	3,32%	3,33%	3,34%	3,34%	3,35%
8.	Berkurangnya penyebaran penyakit menular hewan;							
9.	Meningkatnya populasi dan kualitas genetik ternak ( ternak besar, kecil dan unggas );							
10.	Meningkatnya produktivitas lahan kering melalui optimalisasi lahan dan perbaikan sumber daya air;		- Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Terpeliharanya sarana dan prasarana irigasi melalui kegiatan pengolahan lahan dan air (PLA);							
12.	Tersedianya produk-produk tanaman pangan, perkebunan dan peternakan unggulan daerah;		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	5,09%	5,19%	5,29%	5,40%	5,50%
13.	Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik air tanah maupun air permukaan untuk tanaman dan peternakan;							
14.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi pedesaan.		Cakupan Bina Kelompok Petani	34,72%	38,19%	42,01%	46,22%	50,84%

Catatan : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (BPS Kota Bima)



# BAB 5

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kota Bima

<b>VISI</b> : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri			
<b>MISI</b> : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar), produksi hortikultura (mangga, bawang merah, kacang panjang, garoso, pisang), produksi peternakan (sapi, kambing, ayam dan itik/bebek) dan produksi perkebunan (jambu mente, tembakau, kelapa);  Meningkatnya penggunaan benih dan bibit unggul bermutu pada tiga komoditi utama pertanian yakni padi, jagung dan kedelai, perkebunan serta peternakan;  Meningkatnya pusat penangkaran benih tanaman pangan, perkebunan dan pembibitan ternak;  Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam budidaya tanaman;  Tersedianya pupuk bersubsidi baik organik maupun pupuk anorganik untuk memenuhi kebutuhan tanaman;	Meningkatnya Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian.	a. Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);  b. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).	a. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);  b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak;  c. Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan dan diversifikasi komoditi serta pemasaran produk pertanian;
	Meningkatnya Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	Pengembangan subsektor peternakan berbasis	a. Peningkatan kualitas produk peternakan;  b. Meningkatkan kualitas sumber daya peternakan;



<b>VISI</b> : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri			
<b>MISI</b> : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Meningkatnya jumlah dan kualitas pelaku usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;</p> <p>Menurunnya tingkat serangan Organisma Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan;</p> <p>Meningkatnya produksi daging, telur dan hasil olahan;</p> <p>Berkurangnya penyebaran penyakit menular hewan;</p> <p>Meningkatnya populasi dan kualitas genetik ternak ( ternak besar, kecil dan unggas );</p> <p>Meningkatnya produktivitas lahan kering melalui optimalisasi lahan dan perbaikan sumber daya air;</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana irigasi melalui kegiatan pengolahan lahan dan air (PLA);</p> <p>Tersedianya produk-produk tanaman pangan, perkebunan dan peternakan unggulan daerah;</p> <p>Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik air tanah maupun air permukaan untuk tanaman dan peternakan;</p> <p>Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi pedesaan.</p>		industri.	c. Pengembangan kawasan peternakan.
		Menumbuhkembangkan potensi sektor pertanian yang berorientasi agribisnis secara optimal yang berwawasan lingkungan.	<p>a. Pengembangan kawasan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang modern, tangguh dan pemberian jaminan kehidupan yang lebih baik bagi petani;</p> <p>b. Peningkatan efisiensi usaha melalui inovasi unggul dan berdaya saing;</p> <p>c. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, efisien dan produktif serta berkelanjutan yang dapat mendukung ketahanan ekonomi dan pelestarian lingkungan;</p> <p>d. Meningkatkan akses petani terhadap sumber daya, modal, teknologi dan pasar.</p>
		Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan sektor pertanian.	<p>a. Pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan;</p> <p>b. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan yang modern, tangguh, efisien dan produktif.</p>
		Mendorong diversifikasi produksi.	Pengembangan usaha dan diversifikasi produksi sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) yang berdaya saing dan bernilai ekonomis tinggi.



# BAB 6

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

---

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima dalam kurun waktu tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2018-2023 mengacu pada VISI dan MISI Pemerintah Kota Bima dan RPJMD Kota Bima dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bima, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Rencana Tata Ruang dan Isu-Isu Strategis yang berkembang.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik;
  - 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - 1.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - 1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - 1.8. Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan;
  - 1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 1.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 1.11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 1.12. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - 1.13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; dan
  - 1.14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - 2.1. Pembangunan Gedung Kantor;
  - 2.2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 2.3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;



- 2.4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - 2.5. Pengadaan Meubelair;
  - 2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - 2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 2.8. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor; dan
  - 2.9. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
    - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
    - 3.2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
    - 3.3. Pengadaan Pakaian KORPRI; dan
    - 3.4. Pengadaan Pakaian Olahraga.
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
    - 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
    - 4.2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
    - 4.3. Konsultansi dan Studi Banding; dan
    - 4.4. Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
    - 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
    - 5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
    - 5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
    - 5.4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
    - 5.5. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD.
  6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan :
    - 6.1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis;
    - 6.2. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
    - 6.3. Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani;
    - 6.4. Pelaksanaan PEDANA/PENAS dan Kontak Tani Andalan; dan
    - 6.5. Pelaksanaan Lomba Bagi Kelompok Tani Dan Petani, Kelompok PUAP Serta Pekarangan.
  7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan :
    - 7.1. Penyusunan Database Potensi Produk Pangan;
    - 7.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian;
    - 7.3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
    - 7.4. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija;
    - 7.5. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering;
    - 7.6. Pengembangan Perbibitan/Perbenihan;
    - 7.7. Pengembangan Sistem Informasi Pasar;
    - 7.8. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian;
    - 7.9. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya;
    - 7.10. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pascapanen;



- 7.11. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian;  
dan
- 7.12. Pengembangan Tanaman Sayur-Sayuran.
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, dengan kegiatan :
  - 8.1. Pembangunan Pusat-Pusat Etalase/Eksibi/Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
  - 8.2. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah;  
dan
  - 8.3. Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Yang Akan Dipasarkan.
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, dengan kegiatan :
  - 9.1. Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna;
  - 9.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;
  - 9.3. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna;
  - 9.4. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna; dan
  - 9.5. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Tanam.
10. Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan kegiatan :
  - 10.1. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
  - 10.2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian;
  - 10.3. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian; dan
  - 10.4. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian.
11. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan kegiatan :
  - 11.1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
  - 11.2. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan; dan
  - 11.3. Penyusunan programa penyuluhan pertanian.
12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan kegiatan :
  - 12.1. Pendataan Masalah Peternakan;
  - 12.2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
  - 12.3. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah;
  - 12.4. Pencacahan dan Pengkartuan Ternak;
  - 12.5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - 12.6. Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;  
dan
  - 12.7. Pengendalian dan Penertiban Ternak.





13. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 13.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak;
  - 13.2. Pembibitan dan Perawatan Ternak;
  - 13.3. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat;
  - 13.4. Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak;
  - 13.5. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak;
  - 13.6. Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak;
  - 13.7. Pengembangan Agribisnis Peternakan; dan
  - 13.8. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan.
  
14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan :
  - 14.1. Pembangunan Pusat-Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan;
  - 14.2. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah; dan
  - 14.3. Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan Yang Akan Dipasarkan.
  
15. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dengan kegiatan :
  - 15.1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna;
  - 15.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna;
  - 15.3. Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna; dan
  - 15.4. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



# BAB 7

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 14. Indikator kinerja Dinas Pertanian Kota Bima yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (2018)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PDRB Sektor Pertanian							
	- Kontribusi Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB	11,84%	11,87%	11,89%	11,91%	11,94%	11,96%	11,96%
	- Kontribusi Pertanian Tanaman Pangan Terhadap PDRB	47,25%	47,34%	47,44%	47,53%	47,63%	47,72%	47,72%
	- Kontribusi Pertanian Horikultura Terhadap PDRB	11,50%	11,52%	11,55%	11,57%	11,59%	11,62%	11,62%
	- Kontribusi Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	1,49%	1,50%	1,50%	1,50%	1,51%	1,51%	1,51%
	- Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB	36,44%	36,51%	36,59%	36,66%	36,76%	36,81%	36,81%
	- Kontribusi Jasa Pertanian dan Perburuan Terhadap PDRB	3,32%	3,32%	3,33%	3,34%	3,34%	3,35%	3,35%
	- Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	4,99%	5,09%	5,19%	5,29%	5,40%	5,50%	5,50%
3.	Cakupan Bina Kelompok Petani	31,57%	34,72%	38,19%	42,01%	46,22%	50,84%	50,84%

Catatan : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (BPS Kota Bima)



## **BAB** 8

## **PENUTUP**

---

Rencana Strategik Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2018-2023, akan dapat dilaksanakan dengan baik sangat tergantung dari partisipasi aktif semua pihak, kerjasama yang harmonis antar pelaku pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan disemua tingkatan serta terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kota Bima, November 2018

Kepala Dinas,

**IR. HJ. RINI INDRIATI**

NIP. 19650705 199103 2 018